

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Oleh :  
Dra. NURMAYANI M.Ag

**ABSTRAK**

*Dosen jurusan PGSD FIP UNIMED memandang perlu adanya pendidikan multikultural yaitu suatu gerakan pembaruan dan inovasi pendidikan dalam rangka menanamkan kesadaran pentingnya hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan, dengan spirit kesetaraan dan kesederajatan, saling percaya, saling memahami dan menghargai persamaan, perbedaan dan keunikan Agama- agama, sehingga terjalin suatu relasi dan interdependensi dalam situasi saling mendengar dan menerima perbedaan pendapat dalam pikiran terbuka , untuk menemukan jalan terbaik mengatasi konflik dan menciptakan perdamaian melalui kasih sayang antar sesama.*

*Maka dari itu implementasi pendidikan multikultural tidak akan lepas dari konsep-konsep pembaharuan pendidikan, karena pembaharuan pendidikan mempunyai konsep konstruktif yang membentuk terwujudnya pendidikan multikultural. Menurut Hujair A.H. Sanaky<sup>1</sup>, dalam melakukan pembaharuan, pendidikan diharapkan mengorientasikan tujuannya lebih bersifat problematis, strategis, aspiratif, menyentuh aspek aplikasi, serta dapat merespon kebutuhan masyarakat. Kemudian dari kerangka ini, tujuan yang dirumuskan meliputi aspek ilahiyah (teoritis), fisik dan intelektual, kebebasan (liberal), akhlak, profesionalisme, berkualitas, dinamis, dan kreatif sebagai insan kamil dalam kehidupannya.*

*Kata Kunci :*

---

<sup>1</sup> Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan* .....h. 157.

### Pendahuluan

Secara eksplisit, konsep tentang pendidikan multikultural tertuang dalam UU Sisdiknas 2003 bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan. Dalam pasal 4: 1 UU Sisdiknas/2003 disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Hal ini masih ditambah dengan pasal 4: 3 UU tersebut yang menyebutkan pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Munculnya pasal tersebut tentunya bukan tanpa dasar, melainkan dilatar belakangi oleh kondisi bangsa Indonesia yang masyarakatnya sangat majemuk atau plural. Kemajemukan bangsa Indonesia ini dapat dilihat dari dua sisi; horizontal dan vertikal. Secara horizontal, kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, pakaian, makanan dan budaya materialnya. Sementara secara vertikal, kemajemukan bangsa Indonesia dapat diamati dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Paulo Freire, pendidikan bukan merupakan "menara gading" yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan menurutnya, harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya.

Definisi yang lain menyebutkan bahwa pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya

yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak.<sup>2</sup>

Mengenai fokus pendidikan multikultural, Tilaar mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau mainstream. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya mainstream yang dominan, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat *mainstream*. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap "peduli" dan mau mengerti (*difference*), atau "*politics of recognition*" politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.

Pendidikan multikultural (*multicultural education*) juga merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi dan perhatian terhadap orang-orang non Eropa. Sedangkan secara luas pendidikan multikultural itu mencakup seluruh peserta didik tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnik, ras, budaya, strata sosial dan agama.

---

2

<http://www.grasindo.co.id/detail.asp?ID=50104457>

Menurut penelitian Banks<sup>3</sup> terdapat berbagai dimensi di dalam perkembangan pendidikan multikultural di Amerika:

- a. **Integrasi pendidikan dalam kurikulum (*content integration*):** Upaya untuk mengintegrasikan pendidikan multikultural di dalam kurikulum dan di mana atau bagian apa dalam kurikulum integrasi tersebut ditempatkan. Isi kurikulum tersebut antara lain berkaitan dengan masalah bagaimana mengurangi berbagai prasangka di dalam perlakuan dan tingkah laku rasial dari etnis-etnis tertentu dan di dalam materi apa prasangka-prasangka tersebut dapat dikemukakan. Di dalam kaitan ini diperlukan studi mengenai berjenis-jenis kebudayaan dari kelompok-kelompok etnis. Di dalam kaitan *ethnic studies movement* sejak tahun 1960-an di Amerika Serikat. Termasuk di dalam gerakan ini adalah menulis dan mengumpulkan sejarah dari masing-masing kelompok etnis yang ada di dalam masyarakat.
- b. **Konstruksi ilmu pengetahuan (*knowledge construction*):** Di dalam kaitan ini dipelajari mengenai sejarah perkembangan masyarakat Barat dan perlakuannya, serta reaksi dari kelompok etnis lainnya. Sejarah

berisi hal-hal yang positif maupun yang negatif yang perlu diketahui oleh peserta didik di dalam upaya mengerti kondisi masyarakatnya dewasa ini.

- c. **Pengurangan Prasangka (*prejudice reduction*):** Prasangka rasial memang dihidupkan sejak kanak-kanak. Di dalam pergaulan sesamanya mulai ditanamkan prasangka-prasangka yang positif maupun yang negatif terhadap sesamanya. Dengan pergaulan antar kelompok yang intensif, prasangka-prasangka buruk dapat dihilangkan dan dapat dibina kerja sama yang erat dan saling menghargai. Peringatan akan pahlawan-pahlawan, tanpa membedakan warna kulit dan agamanya merupakan cara-cara untuk menanamkan sikap positif terhadap kelompok etnis tertentu. Nilai-nilai tersebut dimasukkan di dalam kurikulum tanpa merubah struktur kurikulum itu sendiri. Akhirnya pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik ditransformasikan di dalam perbuatan, misalnya di dalam memperingati hari-hari besar dari masing-masing kelompok etnis yang ada di dalam sekolah atau masyarakatnya.
- d. **Pedagogik kesetaraan antarmanusia (*equity pedagogy*):** Kebudayaan berkaitan dengan kehidupan yang nyata. Kelompok-kelompok etnis yang tersisihkan disebabkan karena sikap yang tidak adil di dalam masyarakat. Oles sebab itu, diperlukan pedagogik yang memperhatikan antara lain kelompok-kelompok masyarakat miskin yang tidak memperoleh kesempatan yang sama dibandingkan

---

<sup>3</sup> Lihat James A. Banks "Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice" dalam James A. Bank & Cherry A. McGee Bank (editor). 2001/2004. *Handbook of Research on Multicultural Education (second edition)*. San Fransisco: Jossey-Bass atau H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme*. h. 138-140.

dengan kelompok anak-anak dari golongan menengah atau golongan atas. Demikian pula, ternyata ada kaitan antara intelegensi anak dengan kehidupannya. Anak-anak dari kelompok masyarakat miskin biasanya terhalang perkembangan intelegensinya dan oleh sebab itu, perlu diperhatikan dengan lebih seksama tentang perbaikan sosial ekonomi dari peserta didik yang kebanyakan dari kelompok etnis yang dilupakan.

e. **Pemberdayaan budaya sekolah (*empowering school culture*):**

Keempat pendekatan tersebut di atas semuanya bermuara kepada pemberdayaan kebudayaan sekolah. Apabila pendekatan-pendekatan pendidikan multikultural tersebut di atas dapat dilaksanakan maka dengan sendirinya lahir kebudayaan sekolah yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Sekolah haruslah merupakan suatu motor penggerak di dalam perubahan struktur masyarakat yang timpang karena kemiskinan ataupun tersisih di dalam budaya "*mainstream*" masyarakat.

Demikianlah pada garis besar perkembangan terkini dari pendidikan multikultural di Amerika Serikat dewasa ini. Ternyata pendidikan multikultural bukan hanya berkenaan dengan masalah-masalah kebudayaan dalam arti sempit, tetapi ternyata berkenaan dengan masalah-masalah politik, yaitu kesamaan derajat manusia, perubahan struktur sosial yang tidak mengenal pembedaan kelompok manusia berdasarkan asal-usul etnisnya, perbedaan agama maupun perbedaan gender.

**A. Pengertian Pendidikan Multikultural**

Sebagai sebuah wacana baru, pengertian pendidikan multicultural sesungguhnya hingga saat ini belum begitu jelas dan masih banyak pakar pendidikan yang memperdebatkannya. Namun demikian, bukan berarti bahwa defenisi pendidikan multicultural tidak ada atau tidak jelas. Sebetulnya, sama dengan defenisi pendidikan yang penuh penafsiran antara satu pakar dengan pakar lainnya didalam menguraikan makna pendidikan itu sendiri. Hal ini juga terjadi pada penafsiran tentang arti pendidikan multicultural.

Selanjutnya James Banks menjelaskan, bahwa pendidikan multikultural memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan satu dengan yang lain yaitu: **pertama**, *Content Integration*, yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/ disiplin ilmu. **Kedua**, *the knowledge construction process*, yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya kedalam sebuah mata pelajaran (disiplin). **Ketiga**, *an equity pedagogy*, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya (*culture*) ataupun sosial (*social*). Keempat, *prejudice reduction*, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka. Kemudian, melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staff dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif.<sup>4</sup>

Menurut prof. HAR Tilaar, pendidikan multicultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 177-178.

“interkulturalisme” sesuai perang dunia (PD) kedua. Kemunculan gagasan dan kesadaran “interkulturalisme” ini, selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karna meningkatnya pluralitas (keberagaman di Negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari Negara-negara baru merdeka ke Amerika dan Eropa.<sup>5</sup>

### B. Wacana Pendidikan Multikultural Di Indonesia

Hingga saat ini wacana pendidikan multicultural di Indonesia belum tuntas dikaji oleh berbagai kalangan, termasuk para pakar dan pemerhati pendidikan sekalipun. Perlu diketahui, bahwa di Indonesia pendidikan multicultural relative baru di kenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, plural. Terlebih pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru diberlakukan sejak 1999 hingga saat ini. Pendidikan multicultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan dengan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai counter terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah (otoda). Apabial hal itu dilaksanakan dengan tidak berhati-hati, justru mungkin akan menjerumuskan kita kedalam perpecahan nasional (disintegrasi bangsa dan separatisme).<sup>6</sup>

Menurut azyumardi azra, pada level nasional, berakhirnya sentralisme kekuasaan yang pada masa orde baru memaksakan “monokulturalisme” yang nyaris seragam, memunculkan reaksi balik, yang mengandung

implikasi negative bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang multicultural. Berbarengan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan, jugaterjadi peningkatan fenomena, gejala “provinsialisme” yang hamper tumpang tindih dengan “etnisitas”. Kecendrungan ini, jika tidak terkendali akan dapat menimbulkan tidak hanya disintegrasi sosio-kultural yang amat parah, bahkan juga disintegrasi politik.<sup>7</sup>

Model pendidikan di Indonesia, juga di Negara-Negara lain, menunjukkan keragaman tujuanyang menerapkan strategi dan sarana yang dipakai untuk mencapainya. Sejumlah kritikus melihat, bahwa revisi kurikulum sekolah yang dilakukan dalam program pendidikan multicultural di Inggris dan beberapa tempat di Australia dan Kanada, terbatas pada keragaman budaya yang ada; jadi terbatas pada dimensi kognitif.<sup>8</sup>

Menurut **H.A.R. Tilaar** ada beberapa dimensi untuk membangun pendidikan multikultural di Indonesia yaitu sebagai berikut :

- a. **“Right to Culture”** dan identitas budaya lokal. Multikulturalisme meskipun didorong oleh pengakuan terhadap hak asasi manusia, namun akibat globalisasi pengakuan tersebut diarahkan juga kepada hak-hak yang lain yaitu hak akan kebudayaan (*right to culture*). Pendidikan multikultural di Indonesia haruslah diarahkan kepada terwujudnya masyarakat madani (*civil society*) di tengah-tengah kekuatan kebudayaan global.
- b. **Kebudayaan Indonesia-yang-menjadi.** Kebudayaan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 178-179.

<sup>6</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan Multicultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.198.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h, 198-199.

<sup>8</sup> *Ibid*, h, 199.

Indonesia-yang-menjadi adalah suatu *Weltanschauung* artinya merupakan pegangan setiap insan dan setiap identitas budaya mikro Indonesia. Sebagai suatu *Weltanschauung*, hal tersebut merupakan suatu system nilai yang baru (*value system*). Sebagai suatu *value system* yang baru memerlukan suatu proses perwujudannya antara lain melalui proses dalam pendidikan nasional. Oleh sebab itu di tengah-tengah maraknya identitas kesukuan, sekaligus perlu ditekankan sistem nilai baru yang akan kita wujudkan, yaitu sistem nilai keindonesiaan. Hal tersebut bukannya suatu yang mudah karena memerlukan *paradigm shift* di dalam proses pendidikan bangsa Indonesia. Sebagai suatu paradigma baru di dalam sistem pendidikan nasional, maka perlu dirumuskan bagaimana pendidikan nasional diarahkan kepada pemeliharaan dan pengembangan konsep negara-bangsa yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan kepada kekayaan kebudayaan dari berbagai suku bangsa di Indonesia.

- c. **Konsep pendidikan multikultural normatif.** Tujuan pendidikan multikultural normatif untuk mewujudkan kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh suatu negara-bangsa, tapi jangan sampai menjadikan konsep pendidikan multicultural normative sebagai suatu paksaan dengan

menghilangkan keanekaragaman budaya-budaya lokal. Pendidikan multikultural normatif justru memperkuat identitas suatu suku yang kemudian dapat menyumbangkan bagi terwujudnya suatu kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia. Konsep ini juga dengan sendirinya sesuai dengan tuntutan atas hak asasi manusia dan sekaligus hak untuk mempunyai dan mengembangkan budaya sendiri (*right to culture*)

- d. **Pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial.** Suatu rekonstruksi sosial artinya upaya untuk melihat kembali kehidupan sosial yang ada dewasa ini. Salah satu masalah yang timbul akibat berkembangnya rasa kedaerahan, identitas kesukuan, *the right to culture* dari perorangan maupun suatu suku bangsa Indonesia, telah menimbulkan rasa kelompok yang berlebihan dan tidak jarang menyebabkan pergeseran dan tidak jarang menyebabkan pergeseran-pergeseran horizontal yang tidak dikenal sebelumnya. Rasa kesukuan yang berlebihan dapat melahirkan ketidakharmonisan di dalam kehidupan bangsa yang pluralis. Oleh sebab itu pendidikan multikultural tidak akan mengenal fanatisme atau fundamentalisme sosial-budaya termasuk agama, karena

masing-masing komunitas mengenal dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Demikian pula di dalam pendidikan multikultural tidak mengenal adanya *xenophobia*.<sup>9</sup>

- e. **Pendidikan multikultural di Indonesia memerlukan pedagogik baru.** Untuk melaksanakan konsep pendidikan multikultural di dalam masyarakat plutalis memerlukan pedagogik baru, karena pedagogik tradisional membatasi proses pendidikan di dalam ruang sekolah yang sarat dengan pendidikan intelektualistik. Sedangkan kehidupan sosial-budaya di Indonesia menuntut pendidikan hati (*pedagogy of heart*) yaitu diarahkan kepada rasa persatuan dari bangsa Indonesia yang pluralistik.<sup>10</sup> Pedagogik yang dibutuhkan ialah: 1) Pedagogik pemberdayaan (*pedagogy empowerment*). 2) Pedagogik kesetaraan manusia dalam kebudayaan yang beragam (*pedagogy of equity*).

Pedagogik pemberdayaan pertama-tama berarti, seorang mengenal budayanya sendiri dan selanjutnya kebudayaan itu digunakan untuk mengembangkan budaya Indonesia di dalam negara-bangsa Indonesia. Di dalam upaya tersebut diperlukan pedagogik

kesetaraan antar-individu, antar suku, dan tidak membedakan asal-usul suku bangsa dan agamanya.

### C. Rancang Bangun Pendidikan Multikultural

HAR Tilaar berpendapat bahwa rancang bangun untuk melaksanakan pendidikan multikultur disusun piranti adalah sebagai berikut:

1. Reformasi kurikulum
2. Mengajarkan prinsip-prinsip keadilan social
3. Mengembangkan kompetensi kurikulum
4. Melaksanakan paedagogik kesetaraan (*equality pedagogy*)

Indicator keberhasilan pendidikan multikultural adalah terbentuknya manusia yang mampu memposisikan dirinya sebagai manusia dan memiliki jati diri yang berbeda dari orang lain dalam masyarakat. Disamping itu memiliki ideology theism, humanism, sodialisme dan kapitalisme dengan penghayatan dan pengamalan untuk bersikap dan berperilaku yang pluralis, heterogenitas dan humanis. Oleh karena itu, indicator keberhasilan pendidikan multicultural dapat dilihat dalam menetapkan ideology yang dikembangkan dalam lembaga pendidikan tersebut<sup>11</sup>

Siapakah yang membutuhkan pendidikan multicultural? Untuk menjawab pertanyaan ini, setidaknya kita mempunyai dua paradigm: paradigm toleransi dan paradigm transformasi. Paradigm toleransi memandang bahwa semua anak-anak/ siswa dari berbagai kelompok yang menjadi target tersangka social dan cultural membutuhkan pendidikan multicultural untuk membangunkan kembali

9 *Xenophobia adalah kebencian terhadap barang atau orang asing, ketidaksukaan pada yang serba asing.* (kamus digital John Echols & Hasan Sadily).

10 H.A.R Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia* (2002).

11 Maslikhah, *Quo Vadis Pendidikan Multikultur*, (Surabaya: Stain Salatiga Press Dan Jp Books, 2007), h.86-87.

harga diri mereka yang rendah: anak-anak/siswa yang hidup dalam setting social campuran memerlukan pendidikan multicultural untuk belajar satu sama lain; dan anak-anak/ siswa yang hidup dalam suatu tatanan social yang homogen biasanya tidak membutuhkan pendidikan multicultural karena problem prasangka social- cultural tidak muncul dalam kondisi semacam ini. Sementara paradigma transformatif menyatakan: setiap orang membutuhkan pendidikan multicultural, pendidikan anti bias dalam semua setting pendidikan tanpa kecuali; persoalan-persoalan dan tugas-tugas sekolah akan bervariasi bagi siswa tergantung pada latar belakang sosial-kultural mereka sekaligus keluarga dan pengalaman hidupnya; dan orang tua dan guru sekaligus siwa perlu terlibat dalam pendidikan multicultural dan pendidikan anti penindasan. Melihat dua paradigma ini, konteks Indonesia kontemporer nampaknya sudah saatnya dan tepat untuk mengakomodasi paradigma yang kedua, guna menciptakan perubahan fundamental dalam etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>12</sup>

#### **D. Pemberlakuan Pendidikan Multikultural**

Pertentangan etnis yang terjadi di Negeri ini beberapa tahun terakhir ini mengajarkan betapa pentingnya pendidikan multikultural bagi masyarakat. Seperti disinggung diatas meskipun Bangsa ini secara formal mengakui keragaman, namun dalam kenyataannya tidak. Sudah sejak lama sistem pendidikan kita terpenjara dalam pemenuhan target sebagai akibat dari kapitalisme yang telah menguasai negeri ini sehingga memunculkan apa yang disebut dengan konsep *link and match*. Dengan demikian, pendidikan tidak lebih dari pabrik raksasa yang

menghasilkan tenaga kerja terampil, namun dengan bayaran murah.

Desentralisasi kebudayaan tidak hanya akan membiarkan sentra-sentra kebudayaan yang tersebar luas di kepulauan Nusantara tumbuh subur, namun juga akan menumbuhkan kreatifitas bangsa. Ini, pada gilirannya, akan menciptakan ketahanan budaya dari gempuran globalisasi. Nilai-nilai budaya yang ada harus dilihat sebagai bagian dari masa depan, dikembangkan secara kreatif dan dalam suatu proses perubahan yang eksistensial. Jika tidak demikian, maka sentra dan kantong-kantong kebudayaan itu akan menjadi lembaga yang defensive dan konservatif.<sup>13</sup>

Pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural senantiasa menciptakan struktur dan proses dimana setiap kebudayaan bisa melakukan ekspresi. Tentu saja untuk mendesain pendidikan multicultural secara praksis, itu tidak mudah. Tetapi, paling tidak kita mencoba melakukan *ijtihad* untuk mendisain sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan multikulturalisme. Setidaknya ada dua hal bila kita akan mewujudkan pendidikan multikultural yang mampu memberikan ruang kebebasan bagi semua kebudayaan untuk berekspresi.

Pertama adalah dialog. Dengan dialog, diharapkan terjadi sumbang pemikiran yang pada gilirannya akan memperkaya kebudayaan atau peradaban yang bersangkutan. Disamping sebagai pengkayaan, dialog juga sangat penting untuk mencari titik temu (*kalimatu sawa*) antar peradaban dan kebudayaan yang ada. Kebudayaan manusia pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang sama.

---

12 Zakiyuddin Baidhawi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h.9-10.

---

13 Choirul Mahfud, *Pendidikan Multicultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. Xi- Xiii.

Yang berbeda hanyalah kemasan luarnya saja. Dialog diharapkan dapat mencari titik-titik persamaan sambil memahami titik-titik perbedaan antar kebudayaan.

Kedua adalah toleransi. Toleransi adalah sikap menerima bahwa orang lain berbeda dengan kita. Dialog dan toleransi merupakan astu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bila dialog itu bentuknya, toleransi itu isinya. Toleransi diperlukan tidak hanya pada tataran konseptual, melainkan juga pada tingkat teknis operasional. Inilah yang sejak lama absen dalam system pendidikan kita. System pendidikan kita selama ini terlalu menitikberatkan pada pengkayaan pengetahuan dan ketrampilan tetapi mengabaikan penghargaan atas nilai-nilai budaya dan tradisi bangsa. Maka, kehadiran wacana baru tentang pendidikan yang menghargai dan menjunjung tinggi terwujudnya kesetaraan budaya merupakan suatu keniscayaan bagi dunia pendidikan nasional kita saat ini.<sup>14</sup>

#### E. Konsep Pendidikan Islam Multikultural

sejarah umat Islam ketika pada era awal masa Muhammad saw. di Madinah dipandang sebagai sebuah peradaban modern yang luar biasa maju. Nilai-nilai universal yang saat ini disuarakan dunia tentang keragaman (*pluarality*), kesetaraan (*equality*), kemanusiaan (*humanity*), keadilan (*justice*) dan nilai-nilai demokrasi (*democratization value*), pada prinsipnya semua itu merupakan bagian peradaban Islam yang dipresentasikan Muhammmad saw di eranya. Piagam Madinah menjadi piagam tertua di dunia yang menata kehidupan masyarakat multikultur pada waktu itu di saat tidak satu pun peradaban bisa melakukannya. Tidak berhenti sampai di sana ketika umat Islam sampai ke Eropa, Islam meletakkan nilai-nilai yang dianggap saat ini

sebagai etika peradaban modern pada masyarakat Eropa yang saat itu di huni oleh tiga agama besar. Islam lagi-lagi menempatkan wilayah Eropa satu tempat tidur untuk tiga agama.

Munculnya gerakan baru dalam kelompok Islam progresif yang memandang kemajuan dan kemodernan umat Islam di era Madinah perlu direaktualisasikan kembali saat ini, menunjukkan bahwa klaim-kalim terminologi modern bukan sesuatu yang *incompatible* bagi umat Islam. Kalaulah Komisi dunia untuk Kebudayaan dan Pembangunan, menyebut perlunya diciptakan "*global ethic*" yang didasarkan atas elemen-elemen: 1) hak azasi manusia dan tanggung jawab; 2) demokrasi dan elemen masyarakat madani; 3) perlindungan terhadap golongan minoritas; 4) komitmen terhadap pemecahan konflik secara damai; 5) kesamaan dan kesetaraan dan antar generasi, dalam pandangan Islam progresif kita perlu untuk mengapresiasinya.

Pendidikan multikultural mempunyai beberapa karakteristik dalam pengimplementasiannya, menurut Zakiyyudin Baidhawiy (2005:78), karakteristik dari pendidikan multikultural tersebut meliputi tujuh komponen, yaitu belajar hidup dalam perbedaan, membangun tiga aspek mutual (saling percaya, saling pengertian, dan saling menghargai), terbuka dalam berfikir, apresiasi dan interdependensi, serta resolusi konflik dan rekonsiliasi nirkekerasan. Kemudian dari karakteristik-karakteristik tersebut, diformulasikan dengan ayat-ayat al-Qur'an sebagai back up strategis (baca:dalil), bahwa konsep pendidikan multikultural ternyata selaras dengan ajaran-ajaran Islam dalam mengatur tatanan hidup manusia di muka bumi ini, terutama sekali dalam konteks pendidikan.

Pertama; karakteristik belajar hidup dalam perbedaan. Selama ini pendidikan lebih diorientasikan pada tiga pilar pendidikan, yaitu

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. Xiv-Xv

menambah pengetahuan, pembekalan keterampilan hidup (*life skill*), dan menekankan cara menjadi “orang” sesuai dengan kerangka berfikir peserta didik. Kemudian dalam realitas kehidupan yang plural, ketiga pilar tersebut kurang mumpuni dalam menjawab relevansi masyarakat yang semakin majemuk. Maka dari itu diperlukan satu pilar strategis yaitu belajar saling menghargai akan perbedaan, sehingga akan terbangun relasi antara personal dan intra personal. Dalam terminology Islam, realitas akan perbedaan tak dapat dipungkiri lagi, sesuai dengan Q.S. Al-Hujurat:13 yang menekankan bahwa Allah SWT menciptakan manusia yang terdiri dari berbagai jenis kelamin, suku, bangsa, serta interpretasi yang berbeda-beda. Hal ini juga dipertegas dengan sikap Nabi yang berdiam diri ketika ada dua sahabatnya yang berbeda pendapat dalam suatu ketentuan hukum.

Kedua; membangun tiga aspek mutual, yaitu membangun saling percaya (*mutual trust*), memahami saling pengertian (*mutual understanding*), dan menjunjung sikap saling menghargai (*mutual respect*). Tiga hal ini sebagai konsep logis akan kemajemukan dan kehegemonikan, maka diperlukan pendidikan yang berorientasi kepada kebersamaan dan penanaman sikap toleran, demokratis, serta kesetaraan hak. Banyak sekali ayat-ayat al-Qur’an yang menekankan akan pentingnya saling percaya, pengertian, dan menghargai orang lain, diantaranya ayat yang menganjurkan untuk menjauhi berburuk sangka dan mencari kesalahan orang lain (Q.S. al-Hujurat:12), tidak mudah memvonis dan selalu mengedepankan klarifikasi (Q.S. al-Hujurat:6), serta ayat yang menegaskan prinsip tidak ada paksaan (Q.S. al-Baqoroh:256).

Ketiga; terbuka dalam berfikir. Pendidikan seyogyanya memberi pengetahuan baru tentang bagaimana berfikir dan bertindak, bahkan mengadopsi dan beradaptasi terhadap kultur baru yang

berbeda, kemudian direspons dengan fikiran terbuka dan tidak terkesan eksklusif. Peserta didik didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir sehingga tidak ada kejumudan dan keterkekangan dalam berfikir. Penghargaan al-Qur’an terhadap mereka yang mempergunakan akal, bisa dijadikan bukti representatif bahwa konsep ajaran Islampun sangat responsif terhadap konsep berfikir secara terbuka. Salah satunya ayat yang menerangkan betapa tingginya derajat orang yang berilmu (Q.S. al-Mujadallah:11), atau ayat yang menjelaskan bahwa Islam tidak mengenal kejumudan dan dogmatisme (Q.S. al-Baqarah:170).

Keempat; apresiasi dan interdependensi. Karakteristik ini mengedepankan tatanan social yang care (*peduli*), dimana semua anggota masyarakat dapat saling menunjukkan apresiasi dan memelihara relasi, keterikatan, kohesi, dan keterkaitan sosial yang rekat, karena bagaimanapun juga manusia tidak bisa survive tanpa ikatan sosial yang dinamis. Konsep seperti ini banyak termaktub dalam al-Qur’an, salah satunya Q.S. al-Maidah:2 yang menerangkan betapa pentingnya prinsip tolong menolong dalam kebajikan, memelihara solidaritas dan ikatan sosial (*takwa*), dengan menghindari tolong menolong dalam kejahatan.

Kelima; resolusi konflik dan rekonsiliasi nirkekerasan. Konflik dalam berbagai hal harus dihindari, dan pendidikan harus mengfungsikan diri sebagai satu cara dalam resolusi konflik. Adapun resolusi konflik belum cukup tanpa rekonsiliasi, yakni upaya perdamaian melalui sarana pengampunan atau memaafkan (*forgiveness*). Pemberian ampun atau maaf dalam rekonsiliasi adalah tindakan tepat dalam situasi konflik komunal. Dalam ajaran Islam, seluruh umat manusia harus mengedepankan perdamaian, cinta damai dan rasa aman bagi seluruh makhluk (Q.S. asy-

Syura:40), dan secara tegas al-Qur'an juga menganjurkan untuk memberi maaf, membimbing kearah kesepakatan damai dengan cara musyawarah, duduk satu meja dengan prinsip kasih sayang (Q.S. Ali Imran:139).

Berangkat dari pemahaman karakteristik diatas, masih menurut Zakiyyudin Baidhawiy (2005:85), pendidikan multikultural adalah gerakan pembaharuan dan inovasi pendidikan dalam rangka menanamkan kesadaran pentingnya hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan, dengan spirit kesetaraan dan kesederajatan, saling percaya, saling memahami dan menghargai persamaan, perbedaan dan keunikan agama-agama, sehingga terjalin suatu relasi dan interdependensi dalam situasi saling mendengar dan menerima perbedaan pendapat dalam pikiran terbuka, untuk menemukan jalan terbaik mengatasi konflik dan menciptakan perdamaian melalui kasih sayang antar sesama.

#### **F. Pembelajaran Ilmu-Ilmu Agama Islam (Al-Qur'an Dan Hadits) Berbasis Multikultural**

Pembelajaran yang berbasis multikultural di era glabalisasi menuntut guru atau dosen untuk merubah paradigma atau mind-set, sebab peserta didik bukan hanya diposisikan sebagai individu, tetapi ia merupakan waraga lokal dan global.sebagai individu, maka ia memiliki berbagai potensi fitrah manusia, sehingga pembelajaran berfungsi untuk mengembangkan potensi-potensi fitrahnya, serta menyelamatkan dan melindungi fitrahnyaSebagai warga lokal dan global, maka peserta didik dan pembelajarannya difasilitasi dengan berbagai sumber belajar, baik yang bersifat lokal maupun global, dukungan dan jaringan-jaringan kerja (net work) yang digunakan untuk mengoptimalkan berbagai peluang bagi

pengebangan diri mereka selama proses belajar. Kegiatan belajar bisa dilakukan dimana dan kapan saja, kesempatan belajar mereka tidak terbatas sehingga memiliki pandangan atau wawasan lokal dan internasional. Disaat seperti ini peserta didik akan berhadapan dengan berbagai problem dan tantangan yang beraneka ragam sebagai dampak negatif dari globalisasi. Karena itu pembelajaran juga berfungsi untuk menyelaraskan langkah perjalanan fitrah mukhallaqah (fitrah yang diciptakan oleh Allah pada manusia, yang berupa naluri, potensi jismiyah, nafsiyah, aqliyah dan qalbiyah) dengan rambu-rambu fitrah munazzalah (fitrah yang diturunkan oleh Allah sebagai acuan hidup yaitu agama) dalam semua aspek kehidupannya, sehingga manusia dapat lestari hidup diatas jalur kehidupan yang benar, atau diatas jalur "ash-shirath al-mustaqim).<sup>15</sup>

Dalam hal ini UNESCO berpendapat ada 4 pilar pendidikan multikultural:

1. Learning to do
2. Learning to be
3. Learning to know
4. Learning to live together

#### **Penutup**

Hingga saat ini wacana pendidikan multicultural di Indonesia belum tuntas dikaji oleh berbagai kalangan, termasuk para pakar dan pemerhati pendidikan sekalipun. Perlu diketahui, bahwa di Indonesia pendidikan multicultural relative baru di kenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, plural. Terlebih pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru diberlakukan sejak 1999 hingga saat ini. Pendidikan multicultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan

---

15 Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.289-290

dengan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai counter terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah (otoda). Apabial hal itu dilaksanakan dengan tidak berhati-hati, justru mungkin akan menjerumuskan kita kedalam perpecahan nasional (disintegrasi bangsa dan separatisme).

Secara eksplisit, konsep tentang pendidikan multikultural tertuang dalam UU Sisdiknas 2003 bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan. Dalam pasal 4: 1 UU Sisdiknas/2003 disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Hal ini masih ditambah dengan pasal 4: 3 UU tersebut yang menyebutkan pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

HAR Tilaar berpendapat bahwa rancang bangun untuk melaksanakan pendidikan multikultur disusun piranti adalah sebagai berikut:

5. Reformasi kurikulum
6. Mengajarkan prinsip-prinsip keadilan social
7. Mengembangkan kompetensi kurikulum
8. Melaksanakan paedagogik kesetaraan (equality pedagogy)

Sebenarnya, sejak Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT sudah ada prinsip-prinsip tentang pendidikan multicultural, sebagaimana yang tertuang dalam surat al-hujurat ayat 13 yang menekankan bahwa Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dari berbagai suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya, dan sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling

taqwa. Hal ini juga dipertegas dengan sikap nabi yang berdiam diri ketika ada dua sahabatnya yang berbeda pendapat dalam suatu ketentuan hukum, dan masih banyak lagi dalam ayat-ayat lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Choirul Mahfud, *Pendidikan Multicultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- H.A.R Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia* 2002.
- <http://www.grasindo.co.id/detail.asp?ID=50104457>
- Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan*
- James A. Banks "Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice" dalam James A. Bank & Cherry A. McGee Bank (editor). 2001/2004. *Handbook of Research on Multicultural Education* (second edition). San Fransisco: Jossey-Bass atau H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme*.
- Maslikhah, *Quo Vadis Pendidikan Multikultur*, Surabaya: Stain Salatiga Press Dan Jp Books, 2007
- Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- San Fransisco: Jossey-Bass atau H.A.R. Tilaar, *Multicultural Education* second edition, *Multikulturalisme*.
- Zakiyuddin Baidhawi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta: Erlangga, 2005